

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini muncul beberapa pendapat mengenai lingkungan dan sosial. Hal ini karena akibat dari penggunaan sumber daya yang tidak bijaksana dan ketidakprofesionalan bisnis. Perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab atas banyaknya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial paling negatif terjadi pada saat perusahaan melakukan hasil dari kegiatan bisnis seperti polusi udara, limbah produksi, ketidaksetaraan, diskriminasi dan lain – lainnya. Perusahaan tidak cukup hanya mengungkapkan laporan keuangan saja, pada perkembangan sekarang ini muncul yang namanya pengungkapan tata kelola perusahaan yang dirangkum dalam *annual report*, sehingga *annual report* terbentuk dari 3 elemen yaitu manajemen finansial, *Good Corporate Governance* (GCG) dan laporan tanggung jawab sosial (Mujiani dan Jayanti, 2021).

Pengungkapan *Sustainability* dalam laporan keuangan perusahaan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 51 tahun 2017 untuk perusahaan jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Menurut peraturan OJK No. 51 tahun 2017 (POJK.03/2017, 2017) laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Rata – rata perusahaan go publik selalu menerbitkan laporan *sustainability report*. Menurut Tarigan dan Samuel (2015) *sustainability report* berarti laporan yang memuat kinerja keuangan dan informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan. Sedangkan menurut GRI (2016) menjelaskan bahwa laporan berkelanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan keberlanjutan juga menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (misalnya triple bottom line, laporan pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya). *Corporate sosial governance* (CSR) bagian dari mekanisme laporan berkelanjutan yang berprinsip pada kepentingan *Stakeholder* sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

Tujuan disusunnya laporan berkelanjutan (*sustainability report*) ini adalah untuk mengkomunikasikan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan selain itu *sustainability report* ini juga dapat memberikan gambaran secara luas dan terbuka pada seluruh pemangku kepentingan perusahaan (Engel, 2014). Menurut peraturan POJK.03/2017 (2017), perusahaan diminta untuk melakukan pengungkapan *sustainability*, hanya saja yang perlu dinilai dalam pengungkapan tersebut sudah atau tidaknya memenuhi beberapa aspek yang pengungkapan (Sofa dan Respati, 2020).

Sustainability reporting menjadi bukti salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdialog dengan calon *stakeholdernya* sebagai salah satu upaya penerapan pembangunan berkelanjutan (Nasir dkk, 2011). Oleh karena itu penyusunan *sustainability report* pada saat sekarang menempati posisi yang sama penting dengan pengungkapan informasi seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan. *Sustainability report* adalah salah satu laporan perusahaan untuk memberikan informasi dengan mengungkapkan (*disclosure*) atau mengkomunikasikan kepada (*stakeholder*) mengenai kinerja lingkungan, sosial serta tata kelola yang baik (Yurista dan Meihendri, 2017).

Pengungkapan *sustainability report* ini dapat memberikan nilai tambah perusahaan sebagai transparansi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memberikan solusi atas apa yang terkait dengan aktivitas bisnisnya. Menurut Kholmi dan Susadi (2021) *sustainability report* dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah isu utama terkait dengan perkembangan perusahaan, saat ini perusahaan tidak hanya tertuju pada pencapaian keuntungan saja melainkan juga harus fokus mengenai dampak sosial dan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena adanya tuntutan dari *stakeholders* yang menginginkan perusahaan melakukan tanggung jawab yang lebih atas aktivitas bisnis tersebut.

Jadi oleh sebab itu para pelaku *stakeholder* menginginkan perusahaan melakukan tanggung jawab yang lebih atas aktivitas bisnisnya. Para *stakeholder* tidak ingin adanya permasalahan mengenai lingkungan sekitar perusahaan karena

itu akan bergantung kelanjutan perusahaan kedepannya maka tidak jarang para pemangku kepentingan perusahaan menagih atau menyuruh perusahaan untuk melampirkan laporan berkelanjutan. Sebuah entitas yang aktivitasnya hanya untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*, salah satunya yaitu itu adalah pemegang saham. Kelangsungan hidup suatu perusahaan tergantung dari perlakuan perusahaan kepada para *stakeholder*. Perusahaan akan memberikan yang terbaik untuk meningkatkan citra perusahaan agar lebih dikenal oleh pemangku kepentingan. Salah satunya yaitu dengan menerapkan *good corporate governance* dan mengungkapkan informasi untuk berkomunikasi dengan *stakeholder* (Kholmi dan Susadi, 2021).

Munculnya isu *sustainability report* karena adanya perdebatan di berbagai kalangan masyarakat yaitu isu mengenai “*Green Concern*” dan “*Social Concern*”(Dewi, 2011). Salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Peristiwa ini diabadikan dalam film dokumenter yang berjudul “*Sexy Killer*”. Dalam film dokumenter tersebut menceritakan bagaimana perjuangan warga di Kalimantan untuk mendapat air bersih setelah ekspansi perusahaan tambang atau perjuangan nelayan dan petani di Batang, Jawa Tengah. Belum lagi ditambah dengan meningkatnya risiko penyakit yang disebabkan akibat polusi udara yang dihasilkan oleh PLTU tersebut (Soegijapranata, 2019).

Pada saat itu Indonesia sudah memiliki aturan yang mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial, lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tetapi saat itu kegiatan CSR tidak sepenuhnya

memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan malah perusahaan lebih fokus kepada sasaran pemasaran. Kurangnya analisa laporan yang dibuat perusahaan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan tersebut membuat pemerintah tidak dapat mengawasi dan mengukur seberapa jauh komitmen program perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan alam dan sosial yang terkena dampak dari kegiatan operasionalnya (Soegijapranata, 2019).

Dengan adanya kasus tersebut, muncul dilema bagi perusahaan bagaimana agar dapat menunjukkan kontribusi dan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan tanpa mengurangi kepercayaan investor akan keberlangsungan bisnis dari perusahaan itu sendiri. Belajar dari negara lain, perlu adanya regulasi yang mengatur laporan secara terperinci dan terukur yang dapat menjadi catatan penilaian bagi pemerintah dalam mengukur seberapa jauh komitmen dan program perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Laporan tersebut adalah laporan keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan *sustainability report* (Soegijapranata, 2019).

Kasus tersebut menjadi pusat perhatian untuk mengawasi dan mengevaluasi terhadap semua aktivitas dan kegiatan yang dijalankan di lingkungan dan cara pengelolaan sumber daya yang benar dan tepat. Selain itu, perusahaan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada *stakeholder* (Irianto, 2011). Bagi perusahaan, *sustainability report* sebagai alat ukur pencapaian target kerja dalam isu *Triple Bottom Line*. Sedangkan bagi investor, *sustainability report* sebagai alat kontrol atas pencapaian perusahaan sekaligus sebagai media pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumber daya finansialnya.

Sementara pemangku kepentingan lainnya seperti media, pemerintah, konsumen, dan lain-lainnya *sustainability report* sebagai tolak ukur untuk menilai kesungguhan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Hery, 2012).

Keterkaitan kasus ini terhadap *sustainability report* adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan ini tidak hanya kepada masyarakat karena di dalam *sustainability report* memuat tentang tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan. Dilihat dari uraian di atas bahwa banyak pihak yang dirugikan terutama masyarakat sekitar dan sampai sekarang pihak perusahaan belum dapat memenuhi janji atau mengembalikan ganti rugi kepada masyarakat maupun pemerintahan.

Menurut Azzahra (2016) tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Wiranata, 2013). Pemilik akan berusaha membuat strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, setelah strategi ditentukan maka langkah selanjutnya pemilik akan mengimplementasi strategi dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Semua tahapan tersebut tak lepas dari peran dari pemilik maka dapat dikatakan peran pemilik sangat penting karena menentukan keberlangsungan perusahaan (Ratnasari, 2011).

Struktur kepemilikan terdiri dari struktur manajerial, struktur institusional, struktur asing dan struktur publik. Struktur kepemilikan manajemen penting

untuk diteliti karena perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen cenderung lebih baik dalam pengendalian *corporate governance*. Menurut pendapat Wiranada dan Yeterina (2013) Sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris dan selain itu konflik keagenan dapat terjadi antara manajer dan pemilik dan juga antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Struktur kepemilikan pertama yaitu kepemilikan manajerial. Menurut Rustiarini (2011), kepemilikan manajerial adalah kondisi dimana pihak manajer memiliki saham di perusahaan tersebut atau pihak manajer sekaligus menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut. Manajemen ada yang sebagai pemegang saham maka diprediksikan akan memiliki kesadaran yang cukup untuk melaksanakan pengungkapan informasi ekonomi, lingkungan, sosial dan *corporate governance* dalam *sustainability report* (Nurrahman, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan Setyawan (2018) menemukan hasil bahwa kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*, dan menurut penelitian yang dilakukan Utomo (2021) memperoleh hasil negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil dari penelitian Nurrahman (2013) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada praktik pengungkapan *sustainability report*. Hal ini dimungkinkan karena secara statistik rata – rata jumlah kepemilikan saham manajerial pada perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga belum terdapat keselarasan kepentingan antara pemilik dan manajer.

Kedua kepemilikan institusional. Penelitian Menurut Nurrahman (2013) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank dana pensiun, dana *asset management*. Pengungkapan *sustainability report* memperkecil kemungkinan terjadinya ketidak transparansi informasi sehingga besarnya proporsi kepemilikan institusional mampu mempengaruhi kualitas laporan berkelanjutan. Jika tingkat kepemilikan institusional tinggi maka tingkat pengawasan akan tinggi pula karena sebagian kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh pihak instansi keuangan. Menurut Nurrahman (2013) hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yaitu perusahaan dengan kepemilikan institusi dan asing yang tinggi akan memiliki tekanan lebih tinggi untuk mengungkapkan aktivitasnya dengan alasan untuk memasarkan sahamnya.

Menurut penelitian yang dilakukan Nurrahman (2013) menemukan hasil bahwa kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*, hal ini dimungkinkan perusahaan memiliki saham oleh institusi yang lebih besar cenderung memberikan dukungan pada perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report*, Sedangkan di penelitian terbaru Kholmi dan Susadi (2021) menghasilkan kepemilikan institusional dan saham asing memiliki pengaruh signifikan terhadap *sustainability report*.

Ketiga kepemilikan asing. Penelitian menurut Karima (2005) kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Perusahaan

yang multinasional biasanya memiliki kepemilikan asing yang tinggi dan umumnya melihat keuntungan legitimasi berasal dari *Stakeholder*-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas pasar tempat pre-operasi yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Nurrahman, 2013). Pengungkapan *sustainability report* merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan *sustainability report* Nurrahman (2013). Menurut penelitian Karima (2005) kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena pihak asing cenderung lebih memperhatikan isu sosial seperti pendidikan, tenaga kerja dan lingkungan sekitar. Nurrahman (2013) menyatakan kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* dan sedangkan penelitian menurut Utomo (2021) kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report* dan dikatakan dalam penelitian ini ketika semakin meningkatnya porsi kepemilikan asing maka akan mengurangi luas pengungkapan dari laporan keberlanjutan.

Keempat kepemilikan publik. Menurut penelitian Hamdani, Yuliandari dan Budiono (2017) kepemilikan publik adalah proporsi saham yang dimiliki publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi yang memiliki saham dibawah 5% (<5%) yang berada di luar. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik tinggi cenderung

mengungkapkan informasi yang lengkap mengenai keadaan perusahaannya. Semakin tinggi kepemilikan publik, maka semakin banyak pula pihak yang membutuhkan informasi perusahaan Hasil dari penelitian Hamdani, Yuliandari dan Budiono (2017) kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, penelitian tersebut beda dengan hasil dari penelitian Syafira (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Adanya perbedaan hasil peneliti-peneliti ini, maka perlu diteliti pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap pengungkapan pelaporan *sustainability* perusahaan. Penelitian ini replikasi penelitian Nurrahman (2013). Perbedaan penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel kepemilikan publik. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 – 2020.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*?
2. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*?
3. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*?

4. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *sustainability report*.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *sustainability report*
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap *sustainability report*
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap *sustainability report*

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian ini maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, sebagai kontribusi pengetahuan tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan yang dipublikasikan dalam laporan tersendiri yaitu *sustainability report*. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akan pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari isu sosial terhadap perusahaan agar menghasil pengungkapan *Sustainability report* yang baik dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Bagi investor, *sustainability report* sebagai bahan pertimbangan terhadap pertanggungjawaban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki potensi *sustainability report* yang baik.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan *Sustainability Report*

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Hal ini untuk memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab II: LANDASAN TEORI PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab II ini menjelaskan tentang variabel penelitian, jenis data dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data.

Bab III Metode Penelitian

data dan sumber data, metode dalam pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV ini menjelaskan deskripsi analisis data serta pembahasannya dari objek penelitian

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab V ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.